

**ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
(Studi Pada Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling)**

(Skripsi)

**Oleh
AGUSTIN DARMA PUTRI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

ORIENTATION OF WOMEN IN POLITICS ELECTIONS OF HEAD OF REGION IN BANDAR LAMPUNG 2015 (Study on Urban Village Subdistrict Kemiling Permai Kemiling)

By

AGUSTIN DARMA PUTRI

The method used was verificative descriptive quantitative. The populations in this research were the womans of Subdistrict Kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung and 97 samples from womans of Subdistrict Kemiling Permai Kemiling Bandar Lampung by the t-yamane formula.

The results of this study indicated that based on the cognitive aspects largest women know Herman Hn is a religious leader figure of 99.67% and in the very small to the statement that a woman knows that not all prospective head region comes from the bureaucracy 79.7%. In most affective aspects statement section Women happy to know the background of candidates for Regional Head of Bandar Lampung at 99.8% and affective aspects of the smallest on the statement following the political choices of women happy mother / sister in the election of Regional Head of Bandar Lampung by 85% , In most evaluative aspects of the women agreed with the statement mindsets and perspectives of the organization in assessing a leader at 99.3% and evaluative aspects of the smallest on the assertion of women agree that a better selection of family politics than following their own political choices by 91.7%. From 3 aspect, we know that is aspect affective is high than cognitive and evaluative at 98,8%.

Keywords: Women's Political Orientation, Regional Head Election

ABSTRAK

ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling)

Oleh

AGUSTIN DARMA PUTRI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan mengambil sampel yaitu masyarakat di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang berjumlah 97 orang menggunakan rumus *t-yamane*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan aspek kognitif terbesar pada perempuan mengetahui Herman Hn adalah sosok pemimpin yang religius sebesar 99,67% dan di bagian paling kecil pada pernyataan perempuan mengetahui tidak semua calon kepala daerah berasal dari birokrasi sebesar 79,7%. Pada aspek afektif paling besar dibagian pernyataan Perempuan senang untuk mengetahui latar belakang calon Kepala Daerah Kota Bandar Lampung sebesar 99,8 % dan aspek afektif paling kecil di bagian pernyataan perempuan senang mengikuti pilihan politik ibu/kakak dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung sebesar 85%. Pada aspek evaluatif paling besar pada pernyataan perempuan setuju dengan pola pikir dan cara pandang organisasinya dalam menilai seorang pemimpin sebesar 99,3% dan aspek evaluatif paling kecil pada pernyataan perempuan setuju bila pilihan politik keluarga lebih baik daripada mengikuti pilihan politik sendiri sebesar 91,7%. Berdasarkan hasil ketiga aspek tersebut jika dibandingkan maka aspek afektif yang paling tinggi yaitu sebesar 99,8%.

Kata Kunci : Orientasi Politik Perempuan, Pemilihan Kepala Daerah

**ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
(Studi Pada Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling)**

**Oleh
AGUSTIN DARMA PUTRI**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

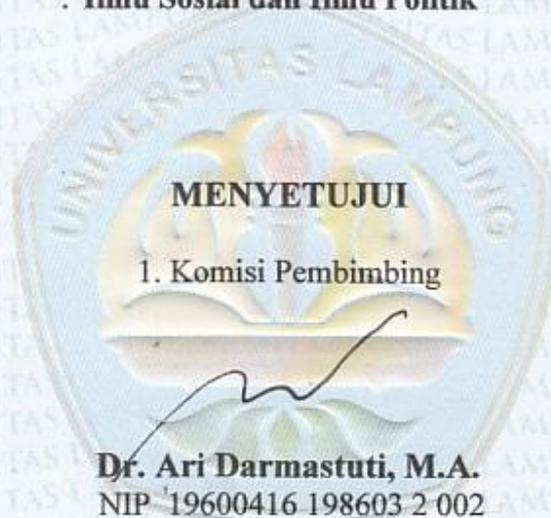
Judul Skripsi : **ORIENTASI POLITIK PEREMPUAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015
(Studi pada Kelurahan Kemiling Permai
Kecamatan Kemiling**

Nama Mahasiswa : **Agustin Darma Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **1216021003**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

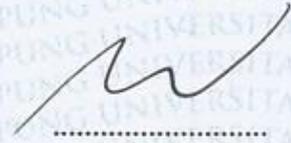
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

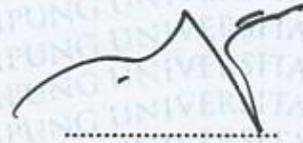
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



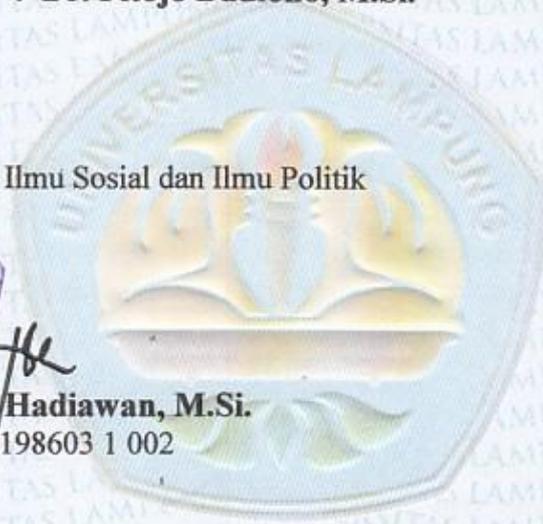
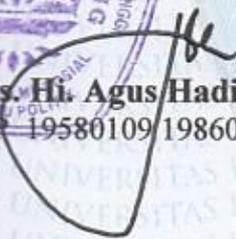
Penguji : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 195801091986031002



Tanggal Lulus Ujian : **13 Mei 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Mei 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Agustin Darma Putri
NPM.1216021003

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Agustin Darma Putri, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 1 Agustus 1994. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri pasangan Bpk Holidar Daud dan Ibu Mahroja Nawawi, S.H., M.M.

Jenjang pendidikan penulis Tk Al-Azhar 16 yang diselesaikan tahun 1999. Penulis melanjutkan ke SD Negeri 3 Kemiling Permai yang diselesaikan tahun 2006, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 28 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya penulis mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012 dengan hasil ujian yang memuaskan.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur undangan pada tahun 2012, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemerintahan (HMJ Ilmu Pemerintahan). Pada tahun 2015 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Panca Mulya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari.

MOTO

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa,
karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya
tanpa berusaha

Agustin Darma Putri

Genggamlah dunia di tanganmu dan letakkan akhirat dihatimu, agar kamu senantiasa
teringat akhirat tanpa melupakan dunia

Abu Bakar ash Shiddiq

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan
hanya Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap

Qs. Al-Insyirah : 5-7

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan karya ini
Kepada*

*Ayahanda dan Ibunda Tercinta, atas penantiannya,
pengorbanannya dan do'a yang tulus tiada henti untuk
keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk
segala cinta kasih yang telah diberikan kepadaku.*

*Adikku mahenda yang selalu memberikan dukungan dan
semangat tidada henti kepadaku selama ini.*

*Seluruh Keluarga Besarku, Sahabat dan teman-temanku
yang selalu mendukungku.*

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Almamater Tercinta

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Orientasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”

Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat dalam mencapai gelar sarjana jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa isi yang tersaji di dalam skripsi ini jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kunia Drajat, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas bimbingan, arahan dan kesabaran serta masukan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Pitoyo Budiono, M.Si selaku Dosen Pembahas penulis yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan, masukan, semangat akan kehidupan serta saran kepada penulis.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
6. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik.
7. Seluruh Staf dan Karyawan di FISIP dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, terutama Pak Andri Marta dan Bu Riyanti terimakasih atas bantuannya
8. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
9. Teristimewa untuk Ayahku Holidar DA dan Ibundaku Mahroja Nawawi yang sangat kucintai dan kusayangi. Terima kasih atas semangat, dukungan dan doa yang terus mengalir untukku, perjuangan dan pengorbanan selama ini yang tak kenal lelah dan tanpa pamrih, guna mewujudkan cita-cita anaknya. Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dengan nikmat dan berkah yang tak terhingga dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Adik Laki-lakiku Mahenda Ali Putra. Terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi yang diberikan selama ini.

11. Teman, sahabat, dan saudara terbaikku Anna Jessickha Kournicova, Irania, Desna Rosdini yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat kepada ku.
12. Kakak-kakak ku tercinta Tiffany Andina Damayanti, Eka Pratiwi, dan Deli Mutia yang selalu memberi nasehat, dukungan dan motifasi dalam menggapai gelar sarjana ini. Sahabat teraneh yang menjadi obat penghibur dikala banyak masalah yang datang Oktomi Rachman, Syaqib Muhammad, Filza Arlisia Putri dan Amelia Firstiani.
13. Sahabat-sahabat terbaikku di kampus yang selalu menemani dan berjuang bersama sama untuk meraih gelar SIP ini Suci Pebrina, Ulima Islami, Rendi Noverdi, Astari Puja Seraya, Juni Renaldu, Nora Hima, Meta Fitriani, dan Tri Umpu Kiraton. Terimakasih atas kebahagiaan dan canda tawa selama ini semoga kelak kita dapat mencapai kesuksesan bersama amin.
14. Kepada sahabat kecilku yang selalu ada di setiap waktu Ario, Hengki Alexander, Fahmi Davidsa, M.Biondy Dami Pratama, dan Nexen Ade Saputra. Geng GO yang sama sama berjuang dari susahny masuk kuliah sampai susahny wisuda Rischa Mollytha, Dina Nadiah, dan Amelia Maryska.
15. Teman-teman seperjuangan Lintang, Dita, Arum, Nisa, Aidila, Intan, Angel, Melyansyah, Nanda, Dian Melon, April, Surya, Erin, Maldy, Kirun, Nico, Adel, Aulia, Devi, Nugraha, Miko, Endrik, Andri, Juwanda, Ubi, Bakti, Yani, Dalilah, Yessy, Oktanina, Rosim, Riska, Maya, Eri, Ayu, Baihaki, Darji, Riski Pranata, Riski Satria, Nasira, Winda, Ari, Nevia, Mutiara dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semua.

16. Terima kasih kepada teman SMAku Ikke, Ade, Rama, Fatur, Albin, Icing, Paiton, Nadia, Jeni, Wewe, Hajri, Wanda, Ando, Diego, Adham, Irvan, Tripang, Anggi, Fidya, Rika, Desy, Attary dan lainnya yang selalu membuat tertawa.
17. Teman-teman KKN desa Panca Mulya, Kecamatan Banjar Baru, Yanse, Mouriska, Abdan, Yanuar, Uci, Ilham, Nadiril, Doni, Ine, Pajrin, Retno. Terima kasih atas kerja sama selama KKN dan terima kasih atas jalinan pertemanan dan persaudaraan sampai saat ini, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
18. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak dan terimakasih keluarga besar HMJ ILMU PEMERINTAHAN 2012 atas kebersamaan selama ini. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sedikit harapan dari penulis adalah semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Mei 2016

Penulis

Agustin Darma Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS	
A. Orientasi Politik	8
1. Pengertian Orientasi Politik.....	8
2. Klasifikasi Orientasi Politik	11
3. Faktor Orientasi Politik	13
4. Teori Gender.. 14	
B. Perempuan.....	18
1. Orientasi Politik Perempuan.....	18
2. Faktor yang Mempengaruhi Orientasi Politik Perempuan	19
C. Pemilihan Kepala Daerah.....	22
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	22
2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah	25
3. Kerangka Pikir.....	28
III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel	30
D. Jenis Data	31
E. Definisi Operasional dan Konseptual	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Skala Data	35
H. Teknik Analisis Data.....	35
IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	38
B. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung	39

C.	Gambaran Umum Kecamatan Kemiling	40
1.	Deskripsi Wilayah Kecamatan Kemiling	40
2.	Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	42
3.	Kondisi Topografi	42
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Identitas Responden	43
B.	Uji Validitas dan Reabilitas	47
C.	Hasil dan Pembahasan tentang Orientasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung	49
D.	Kategori Orientasi Politik perempuan	99
E.	Pembahasan Hasil Penelitian	107
VI.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	113

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penentuan skor	35
2. Sebaran penduduk untuk masing-masing kelurahan kec.kemiling	41
3. Distribusi responden menurut usia.....	44
4. Distribusi responden menurut agama.....	44
5. Identitas responden menurut tingkat pendidikan	45
6. Distribusi respnden menurut pekerjaan	46
7. Uji validitas data	47
8. Uji reabilitas data	49
9. Distribusi pengetahuan perempuan pelaksanaan pemilu	49
10. Distribusi Pengetahuan Perempuan Tentang Calon Cepala Daerah	51
11. Distribusi Pengetahuan Perempuan Pencalonan Kembali Herman	53
12. Distribusi Pengetahuan Perempuan Bahwa Tidak semua Calon Kepala Daerah Bandar Lampung Berasal dari Birokrasi	55
13. Distribusi Pengetahuan perempuan Herman HN Sosok religius	56
14. Distribusi Pengetahuan Perempuan Tentang Agama Calon Kepala Daerah Kota Bandar Lampung	58
15. Distribusi Pengetahuan perempuan Nama Calon dari Ayah/Suami	60
16. Distribusi Pengetahuan Perempuan Calon yang Dijagokan	61
17. Distribusi Pengetahuan Perempuan Tentang Nama-Nama Calon Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dari Cerita Teman	63
18. Distribusi Pengetahuan Perempuan Tentang Siapa Saja Calon Kepala Daerah Pada Saat Mengikuti Kampanye Terbuka	64
19. Distribusi Perasaan Perempuan Tentang Kampanye Terbuka	65
20. Distribusi Perasaan Perempuan Tentang Latar Belakang Calon	67
21. Distribusi Pendidikan Perempuan yang Senang Dengan Calon Kepala Daerah yang Peduli dengan Kesehatan Masyarakat	69
22. Distribusi Pendidikan Perempuan yang Senang Dengan Calon Kepala daerah yang Memiliki Tujuan Pembangunan Di Daerahnya	71
23. Distribusi perempuan yang senang dengan calon kepala daerah yang selalu memakai peci ketika kampanye	73
24. Distribusi agama perempuan yang tidak senang dengan pemimpin yang kurang menghargai agama lain	75
25. Distribusi Perempuan yang Senang Mengikuti Pilihan Politik Ibu/Kakak dalam Memilih Calon Kepala Daerah Kota Bandar Lampung	76
26. Distribusi Perempuan yang Senang dengan Pilihan Politik Keluarga dalam Memilih Calon Kepala Daerah Kota Bandar Lampung	78

27. Distribusi Perasaan Senang Memilih Salah Satu Calon Karena Mengikuti Pilihan Politik Kerabat	79
28. Distribusi Perasaan Senang dengan Pemimpin yang Peduli dengan Nasib Perempuan Dibidang Kesehatan.....	81
29. Distribusi Pengetahuan Perempuan yang Setuju jika Calon Kepala Daerah yang Dijagokan Menang	83
30. Distribusi Pengetahuan Perempuan yang Setuju Bila Herman HN Menang Kembali	85
31. Distribusi Pendidikan Perempuan yang Setuju Bila Herman HN Kembali Terpilih	86
32. Distribusi Pendidikan Perempuan yang Setuju dengan Pemimpin yang dekat dengan Rakyat	88
33. Distribusi Pendidikan Perempuan yang Setuju dengan Pemimpin yang Religius	90
34. Distribusi Perempuan yang Setuju dengan Pembangunan dibidang Tempat Ibadah	91
35. Distribusi Perempuan yang Setuju dengan Ayah/Suami bahwa Herman HN Layak Terpilih Kembali	93
36. Distribusi Perempuan yang Setuju Bahwa Pilihan Politik Keluarga Lebih Baik.....	94
37. Distribusi Penilaian Perempuan yang Setuju Pola Pikir dan Cara Pandang Organisasinya dalam Menilai Seorang Pemimpin	96
38. Distribusi Penilaian Setuju dengan Dijagokannya Herman HN Di lingkungan tempat Tinggal	97
39. Rekapitulasi data angket	99
40. Rekapitulasi kategori orientasi politik kognitif, afektif, evaluatif	100
41. Orientasi politik perempuan berdasarkan kelompok sosial	103
42. Orientasi politik perempuan berdasarkan sosialisasi	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pikir.....	29
2. Grafik kelompok sosial	111
3. Grafik sosialisasi	113

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orientasi politik merupakan perilaku individu, sedangkan perilaku berupa kegiatan. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada Pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik.

Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih perempuan dalam memilih. Tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya termasuk kaum perempuan. (Ramlan Subakti 1992:141)

Orientasi politik pada perempuan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan,

kesempatan dan kekuasaan, dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak. (Mery G.Tan 1992 :1)

Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi, itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat. Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya. (Mar’at 1992 : 25-26).

Sebagai contoh dalam bidang pendidikan politik kaum perempuan pada kecamatan kemiling permai masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Bu Evi yang mengatakan bahwa :

“Kebanyakan perempuan disini tidak mendapatkan sosialisasi tentang dunia politik khususnya tentang Pilkada. Tidak terdapat lembaga politik juga disini menjadi salah satu faktor kurangnya pemahaman pengetahuan politik untuk kaum perempuan. Kebanyakan kaum perempuan di daerah kemiling permai ini lebih memilih terjun ke dunia bisnis atau berwirausaha dibandingkan dengan dunia politik, dengan alasan dunia politik lebih membingungkan. Kebanyakan perempuan kemiling permai in juga beranggapan bahwa politik hanya cocok buat laki-laki bukan perempuan, mengingat calon kandidat kepala daerah kota Bandar Lampung tidak pernah ada perempuan. Mereka hanya mengetahui politik ketika pilkada berlangsung”.

Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar terbentuk melalui proses sosial dan cultural. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif semata-mata tidak hanya dinilai dari kinerja pemerintah dalam membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, hal ini dikarenakan bukan kebijakan yang merupakan bagian terpenting, melainkan pemilih itu sendiri.

Jika kebijakan telah banyak dibuat tetapi para pemilih sangat sedikit untuk memilih perempuan tentunya harapan akan jumlah keterwakilan perempuan yang lebih besar, khususnya dalam memenuhi kuota 30% perempuan di lembaga legislatif akan sulit untuk diwujudkan. Hal ini dapat diartikan keterwakilan politik sangat ditentukan oleh pemilih, Karena pemilih merupakan wujud dari partisipasi rakyat yang menentukan pilihan seperti adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada. (Ayu Anastasia, lembar fakta WRI representasi perempuan, [http : www.academia.edu](http://www.academia.edu)).

Berikut ini terdapat orientasi politik aktivis perempuan LSM Damar dan LSM Sekar sewu pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2010 adalah sebagai berikut:

1. Orientasi kognitif, aktivis perempuan memiliki pemahaman terhadap hakikat Pemilihan Walikota Bandar Lampung sebagai suatu

mekanisme demokratisasi untuk memilih pemerintah kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

2. Orientasi afektif para aktivis perempuan cenderung memiliki perasaan dan sikap yang kurang baik apabila pada proses pemilihan Walikota Bandar Lampung masih terdapat berbagai kecurangan dan kelemahan yang dapat mengurangi dan mengotori hakikat demokrasi lokal
3. Orientasi evaluatif, para aktivis perempuan menilai bahwa proses demokratisasi lokal yang di wujudkan dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung secara umum sudah berjalan dengan baik, namun mereka memiliki harapan kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk memperhatikan kepentingan kaum perempuan. (Hastato Pribadi: 2011)

Akhir tahun 2015 pemilihan kepala daerah serentak di laksanakan seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Lampung berlangsung di 6 kabupaten dan 2 kota, yang di selenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pilkada di Kota Bandar Lampung diikuti oleh beberapa pasang calon walikota dan wakil walikota, baik yang diusung oleh partai, di calonkan oleh gabungan partai-partai maupun yang mencalonkan dari jalur independen.

Fakta politik menunjukkan bahwa Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 di dominasi oleh para calon walikota yang berlatar belakang birokrat atau pejabat negara yang masih aktif. Berikut data berdasarkan rekapitulasi popularitas

1. Herman HN-Yusuf Kolar (Popularitas 37,75%)
2. Thobroni Harun dan Komanurizar (Popularitas 32,19%)
3. M.Yunus dan A.Muslimin (Popularitas 12,75%)

(Sumber: Radar Lampung, edisi 14 Agustus 2015)

Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 9 Desember 2015 Herman Hn menang telak dengan perolehan suara 86,6%

1. M.Yunus dan A.Muslimin (2,01%)
2. Herman Hn-Yusuf Kolar (86,66%)
3. Thobroni Harun dan Komanurizar (11,32%)

(Sumber: pilkada2015.kpu.go.id)

Dari uraian tersebut terlihat fenomena menarik dari perilaku politik dalam kehidupan masyarakat di kota bandar lampung. Masyarakat kota bandar lampung dihadapkan lebih dekat dengan para bakal calon, serta memudahkan akses bersosialisasi bakal calon walikota dan wakil walikota. Gejala-gejala perilaku politik memiliki kaitan erat terhadap orientasi pemilih dengan latar belakang mayoritas pemilih di Bandar Lampung terkait dengan status pendidikan, intelektual dan sosial ekonomi masyarakatnya. Pola pikir dan pertimbangan akal masyarakat dengan status tersebut menjadi suatu kalkulasi yang sederhana untuk melihat apa yang mempengaruhi orientasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kota bandar lampung.

Berdasarkan tiga tipe orientasi politik yang di atas terdapat orientasi afektif yang sangat berpengaruh dalam perilaku politik pemilih perempuan dalam memilih banyaknya pemilih perempuan yang mempunyai dasar pemikiran dihubungkan dengan perasaannya, seperti: memiliki rasa suka dan tidak suka karena penampilan caleg tersebut, berfikir bahwa perempuan tidak pantas masuk kedalam dunia politik, serta dalam memilih tidak rasional hal-hal tersebut dapat ditunjukkan melalui tingkat popularitas dari masing-masing calon kepala daerah.

Melihat dari realitas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya berkenaan dengan orientasi politik perempuan khususnya orientasi politik perempuan dalam penelitian walikota dan wakil walikota bandar lampung. Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu di kelurahan kemiling permai, kecamatan kemiling. Karna kecamatan kemiling menyumbang suara terbanyak ke dua setelah kecamatan panjang dengan 30.519 total suara, dengan kelurahan kemiling permai menyumbang 25,33% suara untuk Herman HN. Selain itu kelurahan kemiling permai juga mempunyai pemilih perempuan terbanyak, dengan jumlah pemilih perempuan 21.249 orang yang lebih banyak dibanding pemilih laki-laki 21.125 Orang

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian apakah faktor yang mempengaruhi Orientasi Politik Perempuan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Orientasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Orientasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya cakrawala pengetahuan dan wawasan dalam kajian ilmu pemerintahan pada khususnya dan khazanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai orientasi politik masyarakat khususnya Perempuan dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah pada masa-masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Orientasi Politik

1. Pengertian orientasi politik

Orientasi politik merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih perempuan dalam memilih. Tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya. Dalam penelitian ini, hal yang masih dalam pemikiran individu perempuan inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam hal memilih calon-calon legislatif .

Orientasi politik ini merupakan perilaku dalam individu, sedangkan perilaku luarnya berupa kegiatan. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik. Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak

kepada pemilih perempuan dalam memilih (Ramlan Surbakti, 1992:141).

Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi, itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat. Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya (Sjamsudin, 1993:8).

Orientasi Politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat terbentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka yang memandang suatu objek politik (Gueltom dalam Mesdiastutie, 2006:15)

Orientasi politik masyarakat dapat berubah melalui dua cara yaitu dengan cara pemaksaan dan dengan cara persuasif. Jika orientasi politik masyarakat dilakukan dengan cara pemaksaan maka masalah yang akan timbul adalah:

1. Sikap Menentang

Suatu ciri yang menonjol yang melekat pada segala bentuk paksaan ialah bahwa tindakan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh yang menjadi sasaran pemaksaan. Reaksi yang lazim ditemui adalah sikap menentang. Penentangan terhadap suatu paksaan dapat saja mengambil bentuk yang keras ataupun lunak, tergantung pada karakter daripada objek pemaksaan, di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan aksi keras yang diberikan terhadap upaya pemaksaan itu dapat berkembang menjadi faktor yang mengancam stabilitas sistem politik.

2. Perubahan sesaat

Berapa lama perubahan yang dilaksanakan itu dapat bertahan dalam masyarakat. Jelas bahwa sesuatu yang dipaksakan itu merupakan hal yang tidak disukai sehingga masyarakat tidak akan mampu memelihara atau melestarikan orientasi yang dipaksakan itu, dan dapat memberikan orientasi politiknya kepada penguasa pemerintah, hal ini berarti bahwa orientasi politik akan hidup selama penguasa mampu menunjang kehadirannya kepada masyarakat (Nazarudin Sjamsuddin, 1993:10).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penulis memaknai bahwa orientasi politik adalah suatu cara pandang individu atau golongan masyarakat terhadap fenomena-fenomena politik yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh

faktor internal maupun eksternal sehingga dapat membentuk sikap yang terpola dalam memandang suatu objek politik.

2. Klasifikasi Orientasi Politik

Definisi tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi politik adalah mengikuti rumusan Parsons dan Shils yaitu Orientasi politik mengacu pada aspek-aspek dan obyek yang dibakukan serta berhubungan antar keduanya dengan menggunakan tiga komponen orientasi politik, yakni:

a. Orientasi Politik Kognitif

Pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya dan juga untuk menilai tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh suatu sistem politik.

b. Orientasi Politik Afektif

Perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya yang membuat seseorang menerima atau menolak suatu sistem politik.

c. Orientasi Politik Evaluatif

Keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi ini ditentukan oleh evaluasi moral yang dimiliki seseorang dan juga berkaitan dengan evolusi

normatif, moral politik dan etika politik (Gabriel A. Almond and Sidney Verba, 1990:16).

Orientasi seseorang dapat dibuka secara sistematis jika memerlihatkan hal-hal berikut:

- a. Pengetahuan apa yang dimiliki seseorang tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, seperti sejarah, ukuran lokasi, kekuasaan, sifat-sifat “konstitusionalnya” dan lain-lain. Bagaimana perasaan-perasaannya terhadap karakteristik sistemik ini? Dan bagaimana pula pendapatnya tentang kelebihan atau kekurangan serta penilaiannya terhadap karakteristik yang sistemik itu?
- b. Bagaimana pemahaman seseorang tentang struktur dan peranan, kaum elit politik dan pengajuan-pengajuan kebijaksanaan yang diperkenalkan ke dalam arus pembuatan kebijaksanaan yang bersifat “upward”? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap suatu struktur, para pemimpin dan semua proposal kebijaksanaan itu?
- c. Bagaimana pemahaman yang dimiliki tentang arus pengokohan kebijaksanaan yang “downward”, struktur-struktur, individu-individu keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses ini? Bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal-hal itu?
- d. Bagaimana perasaan pribadinya sebagai anggota sistem politik tersebut? Bagaimana pemahamannya tentang haknya,

kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang berpengaruh?.

Bagaimana penilaiannya terhadap kemampuannya norma-norma partisipasi atau penampilan apa yang diketahui dan dipergunakan dalam membuat penilaian politik, atau dalam menyampaikan pendapatnya?

(Gabriel A. Almond and Sidney Verba, 1990:19-20).

3. Faktor Orientasi Politik

Pola perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam berpolitik dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti situasi lingkungan atau faktor internal seperti pendidikan, pengetahuan yang orientasinya berkisar pada kehidupan politik yang sedang berlaku, bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri, serta harapan-harapan politik apa yang dimilikinya (Mar'at, 1992: 25-26).

Orientasi pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sedangkan secara eksternal merupakan hasil dari sosialisai nilai-nilai dari lingkungannya (Nur Umi Pelitawati: 2014: 24).

Orientasi politik seseorang dalam memilih yaitu :

- a. Faktor (internal) struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Pada faktor ini ada tiga basis fungsional sikap untuk

memahaminya. Basis pertama adalah yang didasarkan pada kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap suatu obyek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap obyek tersebut. Basis yang kedua atas dasar penyesuaian diri yaitu penilaian yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan subyek itu. Basis yang ketiga adalah sikap didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan

- b. Faktor (eksternal) lingkungan sosial politik yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung ini memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup (Sastroatmodjo, 1995:14-15).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya maka dalam menentukan pilihan berpolitik terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi orientasi politik seseorang dalam memilih yaitu faktor internal; pengetahuan, pendidikan, dan agama dan faktor eksternal; keluarga dan lingkungan masyarakat.

4. Teori Gender

Fakih (2006: 71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan cirri dan sifat-

sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Selanjutnya Santrock (2003: 365) mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan cultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004: 19). Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Abdullah, 2003: 19 mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentuk budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Dalam Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M.

Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender, an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan – harapan budaya terhadap laki – laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki – laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu teori nurture dan teori nature. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium.

1. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki – laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.

Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki – laki dalam perbedaan kelas. Laki – laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

2. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki – laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat

dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender, maka beralih ke teori nature. Agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan gender ini berdampak pula terhadap laki – laki.

3. Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki – laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaumperempuan dan laki – laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki – laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H.Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki – laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan

kebersamaan guna membangun kemitraan yang hamonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

B. Perempuan

1. Orientasi politik perempuan

Orientasi politik pada perempuan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan, dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak (Mery G.Tan 1992:1)

Orientasi politik pemilih perempuan adalah suatu produk yang tidak hadir dengan begitu saja, terdapat faktor-faktor pengetahuan, perasaan dan penilaian yang mempengaruhi orientasi politik seorang pemilih perempuan. Berdasarkan tiga tipe orientasi politik yang diteliti terdapat orientasi afektif yang sangat berpengaruh dalam perilaku politik pemilih perempuan dalam memilih, dikarenakan banyaknya pemilih perempuan yang mempunyai dasar pemikiran dihubungkan dengan perasaannya, seperti: memiliki rasa suka dan tidak suka karena penampilan caleg tersebut, berfikir bahwa perempuan tidak pantas

masuk kedalam dunia politik, serta dalam memilih tidak rasional. (Winda Meilian: 2009)

Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan eksternal.

Hambatan internal berupa keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikawatirkan sosok-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakan dan menyampaikan keinginan serta aspirasinya di bidang politik

Hambatan eksternal antara lain terbentuk dari birokrasi yang paternalistic baik dari luar maupun dari dalam lingkungan perempuan itu sendiri (Affan Gafar, 1999).

2. Faktor-Faktor yang memengaruhi Orientasi Politik Perempuan

Beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan politik perempuan antara lain :

a. Proses sosialisasi

Proses sosialisasi merupakan proses transmisi nilai dalam suatu masyarakat tertentu dari generasi ke generasi yang berlangsung sepanjang waktu. Dalam proses sosialisasi, masyarakat memperoleh informasi, ide dan nilai-nilai yang menjadi

pengetahuan dalam masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh menjadi dasar dalam memberikan penilaian terhadap objek-objek politik. Informasi ini diterima oleh individu melalui media, keluarga dan lingkungan sosial dan menjadi dasar pengetahuan yang digunakan bagi masyarakat atau individu untuk menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya.

Proses transmisi inilah yang diterima perempuan yang berasal dari keluarga, lingkungan, keluarga dan media massa. Nilai yang berasal dari keluarga adalah nilai yang paling mempengaruhi persepsi perempuan terhadap fenomena politik. Suami selalu mendominasi perempuan untuk memperoleh informasi tentang partai politik dan caleg caleg yang akan dipilihnya (Nawal El Saadawi, 2001:34).

b. Kelompok sosial

Secara sosiologis, masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang dapat dikategorisasikan. Pengelompokan ini sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politik masyarakat. Proses sosialisasi yang berlangsung panjang membuat pemilih perempuan mengidentifikasikan dirinya berdasarkan kelompok sosialnya.

Pilihan politik perempuan cenderung mengikuti orang terdekatnya, entah itu bapaknya, kakaknya, atau suaminya, atau kerabat lain yang mungkin memiliki jabatan atau dianggap sebagai tokoh

ditempat tinggalnya. Hal ini karna mungkin lebih percaya dengan orang terdekatnya.

Sikap dan perilaku sebagai aksi dari pemahaman memiliki latar belakang dan konteks yang berbeda. Hal ini juga melibatkan proses-proses dan peristiwa historis yang bertautan dalam nilai-nilai dalam kelompok sosial tersebut. Pada dasarnya, proses sosialisasi dalam kelompok-kelompok sosial melibatkan proses transmisi nilai-nilai yang dipahami oleh kelompok tersebut terhadap anggotanya. Jadi pilihan politik perempuan biasanya akan sangat terpengaruhi dengan proses sosialisasi dan perolehan pengetahuan dari kelompoknya, dan itu sangat berkaitan dengan dimensi psikologis perempuan (Cice Verawati: 2009).

Proses sosialisasi yang panjang, akan membuat seseorang untuk membentuk ikatan yang kuat dengan kelompok sosial ataupun organisasi kemasyarakatan. Sehingga hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politiknya kelak. Pemilih perempuan yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu akan menerima proses internalisasi berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial tersebut, perilakunya secara umum akan berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang secara psikologis sangat mempengaruhi perempuan. Begitupun dengan pilihan politiknya yang secara psikologis akan berkaitan dengan preferensi anggota kelompoknya (Adnan Nursal, 2004:60).

C. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 58 menyebutkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
9. Menyertakan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum
14. Mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
15. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami, atau istri;
16. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
17. Tidak dalam status sebagai kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan, sebagaimana dikemukakan Amirrudin (2003:184-186), yaitu:

- a. Kongkritisasi Demokrasi, dengan memberikan perspektif baru bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah akan memenuhi kaidah

proses demokrasi di dua level struktural dan kultural. Di level struktural, proses Pemilihan Kepala Daerah diduga akan lebih beradab karena melibatkan unsur Partisipasi publik yang makin meluas dari bawah sesuai aspirasi masyarakat lokal. Di level kultural, proses Pemilihan Kepala Daerah memberi keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran.

- b. Adanya kemungkinan kekerasan terhadap proses dan kekerasan terhadap data, sedikit berkurang.
- c. Berkurangnya praktek premanisme politik uang. Jika Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, kemungkinan politik uang dapat diminimalisasi.

Sementara itu kelemahan dari pemilu sistem langsung adalah sebagai berikut:

- a. Makin terpolarisasinya politik uang. Sistem Pemilu Langsung bukan berarti menjadi satu-satunya cara yang sanggup mengatasi politik uang.
- b. Kerawanan sosial politik. Jika politik uang tetap berjalan didukung dengan pengendalian diri dari bakal calon maupun massa pendukung yang rendah, sempurnalah kerawanan sosial potensial terlahir dalam sistem pemilu secara langsung.
- c. Problem kelembagaan politik yang baru. Pemilu langsung bukanlah harus dipahami sebatas bahwa ia merupakan mekanisme demokrasi yang paling otentik.

2. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Abdul A. Harahap yang dikutip (2006:18) menyatakan bahwa:

“Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya, tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak suaranya secara langsung terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah berbagai distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 di dalam BAB VI mengatur tentang pemerintahan pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Pengaturan pasal 18 tersebut dalam UUD 1945 merupakan perubahan ke II dari konstitusi (tahun 2000). Pengertian deokratis dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 bahwa kepala dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

“ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dibawah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “.

Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 Tentang Pemilihan, Pengsahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperjelas lagi yang dimaksud dengan daerah pemilihan adalah:

“ Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara dalam suatu daerah pemilihan provinsi untuk pemilihan Gubernur dan kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan tahapan dan aturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Kerangka Pikir

Setiap masyarakat khususnya perempuan yang mengikuti perkembangan politik sudah pasti memiliki orientasi politik. Orientasi politik merupakan suatu sikap dan cara pandang seseorang atau masyarakat terhadap

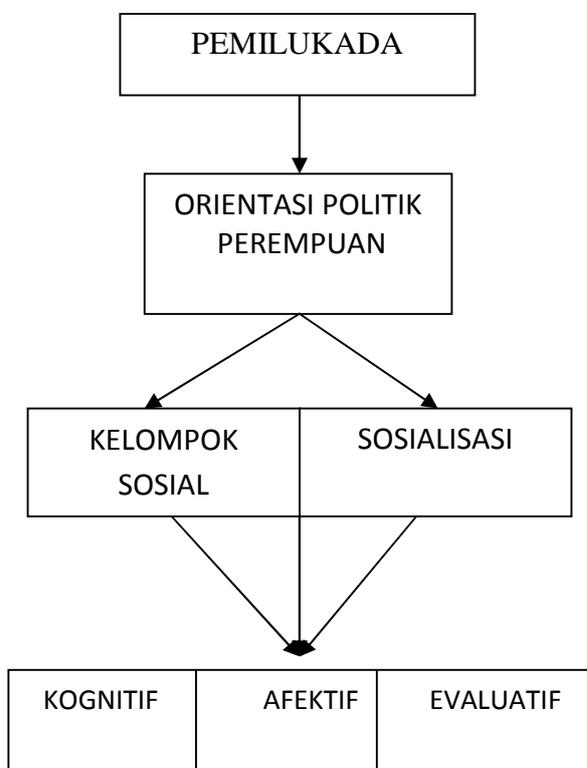
fenomena-fenomena politik. Dari berbagai aspek itu sendiri akan muncul berbagai faktor yang akan mempengaruhi orientasi politik perempuan, baik yang berasal dari dalam atau pun dari luar diri perempuan itu sendiri. Faktor-faktor yang berasal dari dalam (internal) seperti faktor pendidikan, pengetahuan yang dimiliki, dan kepercayaan/agama. Sedangkan faktor yang berasal dari luar (eksternal) yaitu faktor yang berasal dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan tim sukses.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut memilih, memiliki pola perilaku politik tertentu. Tindakan, sikap, dan juga perilaku politik seseorang, merupakan bentuk dari bangunan kognitif dan pemahaman yang terbentuk melalui proses yang panjang. Komponen orientasi kognitif berasal dari tingkat pengetahuan pemilih perempuan mengenai tokoh-tokoh, atau aktor-aktor pemerintah, simbol-simbol negara, simbol-simbol politik, jalannya pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang diambil mereka. Orientasi afektif berbicara tentang perasaan perempuan terhadap aspek-aspek politik. Sedangkan komponen evaluatif berbicara tentang penilaian terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya.

Untuk melihat orientasi politik perempuan dalam memilih seorang kepala daerah terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi yaitu perempuan memilih kepala daerah dilihat dari faktor yang berasal dari dalam (internal) berupa pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki atau kepercayaan yang dianut dan faktor yang berasal dari luar (eksternal) yang berasal dari keluarga atau lingkungan masyarakat.

Berbagai faktor ini yang nantinya akan mempengaruhi orientasi politik perempuan akan cenderung ke arah kognitif, afektif, atau evaluatif.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengetahui Orientasi Politik Ibu Rumah Tangga Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015, sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka berfikir berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif artinya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian.

Pengolahan data dalam penelitian ini merupakan pengolahan data mentah yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrumen penelitian (angket) yang disebarkan kepada objek penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam atau mengukur fakta tentang variabel-variabel yang akan dikaji secara empiris antara hubungannya. Setiap jawaban responden diberi skor tertentu dengan menggunakan penilaian skala interval terhadap jawaban yang berkenaan dengan variabel penelitian.

Tujuan dari instrumen penelitian ini adalah untuk mentransformasikan data kualitatif ke dalam data kuantitatif sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif dengan metode statistik. Penggunaan metode deskriptif verifikatif dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana orientasi politik perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan lokasi yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perilaku politik perempuan dalam pemilihan Kepala Daerah. Penulis menetapkan penelitian pada kecamatan Kemiling Bandar Lampung yang memiliki jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Kecamatan Panjang. (Pilkada2015.kpu.go.id)

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik berupa manusia, benda, peristiwa maupun berbagai gejala yang terjadi, yang merupakan variabel yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Dengan demikian, maka populasi penelitian ini adalah seluruh perempuan di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Bandar Lampung yang berjumlah 3.830 orang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar di DPT sebagai pemilih pada pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi perempuan yang akan dijadikan responden dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus T. Yamane sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + I}$$

Keterangan:

n = Besarnya Sampel
 N = Jumlah Populasi
 d = Nilai presisi (10%)
 I = Bilangan Konstat
 (Sugiyono, 2002: 210)

Berdasarkan rumus di atas maka besarnya sampel adalah:

$$n = \frac{3.830}{3.830(0,1)^2 + 1} = \frac{3.830}{3.830(0,01) + 1} = \frac{3.830}{38,30 + 1}$$

$$= \frac{3.830}{39,30} = 97,45$$

Dengan demikian maka besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 97.45, dibulatkan menjadi 97 orang.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan menggali secara langsung dari responden yang merupakan hasil dari teknik pengumpulan data secara wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini juga melalui penyebaran angket (kuesioner).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam dan penyebaran angket (kuesioner) yang telah dilakukan meupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. Data-data tersebut dari dokumentasi berupa majalah, surat kabar, buku, arsip, situs, wawancara kepada informan yang dipilih dengan mendasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan.

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi operasional variabel berarti Mendefinisikan secara operasional suatu konsep sehingga dapat diukur, dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep, dan mengkatagorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur. Sudjarwo (2009: 174).

1. Orientasi Politik

a. Definisi Konseptual

Orientasi Politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat terbentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka yang memandang suatu objek politik. Gueltom dalam Mesdiastutie (2006:15)

b. Definisi Operasional

Orientasi politik ini merupakan perilaku dalam individu, sedangkan perilaku luarnya berupa kegiatan seperti halnya adalah partisipasi dalam politik. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik.

Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat “membentuk”, keseluruhan “sikap” masyarakat terhadap suatu orientasi, itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan sebagai orientasi politik masyarakat. Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya.

Orientasi Politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat. Sehingga dapat terbentuk sikap dan menjadi terpolola oleh mereka yang memandang suatu objek politik.

2. Perempuan

a. Definisi Konseptual

Orientasi politik pada perempuan dibedakan menjadi dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan, dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada

sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak. Mery G.Tan (1992:1)

b. Definisi Operasional

Orientasi politik pemilih perempuan adalah suatu produk yang tidak hadir dengan begitu saja, terdapat faktor-faktor pengetahuan, perasaan dan penilaian yang mempengaruhi orientasi politik seorang pemilih perempuan. Berdasarkan tiga tipe orientasi politik yang diteliti terdapat orientasi afektif yang sangat berpengaruh dalam perilaku politik pemilih perempuan dalam memilih, dikarenakan banyaknya pemilih perempuan yang mempunyai dasar pemikiran dihubungkan dengan perasaannya, seperti: memiliki rasa suka dan tidak suka karena penampilan caleg tersebut, berfikir bahwa perempuan tidak pantas masuk kedalam dunia politik, serta dalam memilih tidak rasional.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini disusun melalui alat bantu yang disebut instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan secara tertulis dengan menyertakan alternatif jawaban pilihan ganda, untuk mempermudah responden dalam menjawab soal dan mempermudah analisis.
2. Dokumentasi, yaitu melakukan studi dokumentasi dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku, majalah, literatur dan referensi lain.

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit. Sugiyono (2010:194).

G. Skala Data dan Penentuan Skor

Skala data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2002: 112), skala interval adalah skala yang jarak antar datanya bernilai sama. Penentuan skornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penentuan Skor

No.	Jawaban	Skor
1.	SS	4
2.	S	3
3.	TS	2
4.	STS	1

H. Teknik Analisis Data

Analisa data kuantitatif yang digunakan adalah dengan model tabulasi tunggal, yaitu membagi kategori-kategori yang telah ditentukan pada tabel frekuensi, untuk dihitung dengan membuat persentase, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Persentase jawaban

F = Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item

N = Jumlah responden

(Suharsimi Arikunto, 2000: 123)

Untuk mengkategorikan operasional mengenai orientasi politik merupakan suatu cara pandang perempuan terhadap objek dalam Pemilihan Kepala Daerah

Lampung digunakan rumus:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori Jawaban

(Suharsimi Arikunto, 2000: 126)

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Propinsi Lampung merupakan Keresidenan Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No. 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang – Undang No. 14 Tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota nya Tanjungkarang – Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983 dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan.

Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat 1 Lampung No. G/185B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan MENDAGRI no. 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84

kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2001 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka Kota Bandar Lampung Menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung N. 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukkan kelurahan dan kecamatan yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kemudian menjadi 126 kelurahan. Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung Telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut sebagai berikut:

1. Sumarsono (1956-1963)
2. H. Zainal Abidin P.A (1957-1963)
3. Alimudin Umar, SH (1963-1969)
4. Drs.H.M.Thabrani Daud (1969-1976)
5. Drs.H.Fauzi Saleh (1976-1981)
6. Drs.H.Zulkarnain Subing (1981-1986)
7. Drs.H.Nurdin Muhayat (1986-1995)
8. Drs.H.Suharto (1996-2006)
9. Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd (2006-2010)
10. Drs.H.Herman HN, MM (2010-Sekarang)

B. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung Terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari : 1. Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang, 2. Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara, 3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar tanjung karang bagian barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan, 4. Teluk lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan. Di tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai, seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpurn di wilayah Tanjung Karang, dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung.

Daerah hulu sungai berada di bagian barat, daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4 persen total wilayah. Sebagian kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya yaitu Gunung Kunyit, Gunung Mastur, Gunung Bakung, Gunung Sulah, Gunung Celigi, Gunung Perahu, Gunung Cerepung, Gunung Sari, Gunung Palu, Gunung Depok, Gunung Kucing, Gunung Banten, Gunung Sukajawa, Bukit Serampok, Jaha dan Lereng, Bukit Asam, Bukit Pidada, Gugusan Bukit Hatta, Bukit Cepagoh, Bukit Kaliawi, Bukit Palapa I, Bukit Palapa II, Bukit Pasir Gintung, Bukit Sukadanaham,

Bukit Susunan Baru, Bukit Suka Menanti, Bukit Kelutum, Bukit Randu, Bukit Langgar, Bukit Camang Timur dan Bukit Camang Barat.

C. Gambaran Umum Kecamatan Kemiling

1. Deskripsi wilayah kecamatan kemiling

Kecamatan Kemiling merupakan bagian dari salah satu kecamatan dalam wilayah kota Bandar Lampung. Kecamatan Kemiling merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan induknya, yaitu Tanjung Karang Barat, yang berdasarkan pada peraturan daerah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pembangunan, Penghapusan, dan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung. Kecamatan Kemiling merupakan bagian wilayah Kota Bandar Lampung yang berpenduduk 81.122 jiwa pada tahun 2012 dengan Luas Wilayah 2.765 Ha.

Sejak pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Kemiling Telah mengalami 8 kali pergantian camat yaitu:

1. DARSONO (1999-2001)
2. ENDANG SUHERMAN (2001-2003)
3. EDIAR SALEH (2003-2005)
4. RIDWAN AGUS (2005-2007)
5. FAHRUDDIN (2007-2009)
6. SAPRILSYAH (2009-2011)
7. M. ANDI NURDIN (2011-2014)
8. THOMAS AMIRICO (2014-Sekarang)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2012, Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan Kemiling dibagi menjadi 9 (sembilan) Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Sumber Rejo
2. Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera
3. Kelurahan Kemiling Permai
4. Kelurahan Kemiling Raya
5. Kelurahan Beringin Raya
6. Kelurahan Beringin Jaya
7. Kelurahan Pinang Jaya
8. Kelurahan Sumber Agung
9. Kelurahan Kedaung

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Kemiling berada di Kelurahan Beringin Jaya. Masing – Masing kelurahan tersebut memiliki Jumlah Penduduk yang berbeda, seperti disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 2 Sebaran Penduduk untuk masing-masing kelurahan di kecamatan Kemiling, Tahun 2013

Kelurahan	Luas Daerah (Km²)	Jumlah Penduduk (orang)
Sumber Agung	4,98	3.101
Kedaung	6,52	1.223
Pinang Jaya	1,95	4.026
Kemiling Raya	1,98	11.150
Sumber Rejo	2,55	10.590
Kemiling Permai	1,00	11.934
Sumber Rejo Sejahtera	2,50	5.228
Beringin Jaya	2,41	7.510
Beringin Raya	1,14	5.762

Sumber: BPS, 2013

2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara Geografis Kecamatan Kemiling sebagian besar daerahnya datar sampai dengan berombak 60%, berombak sampai dengan berbukit 25%, berbukit sampai dengan bergunung 15%, adapun sisanya 15% merupakan wilayah dengan ketinggian 450 meter diatas permukaan laut.

Adapun batas wilayah Kecamatan kemiling adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Raja Basa

Sebelah Selatan : Kecamatan Teluk Betung Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Karang Barat

Sebelah Barat : Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

3. Kondisi Topografi

Kecamatan Kemiling Secara Topografi mempunyai wilayah yang bergunung terutama dibagian sebelah barat dan hampir 30% dari luas wilayahnya merupakan daerah pemukiman (Perumnas).

Kecamatan Kemiling termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2000mm s/d 3000mm/tahun, dengan suhu rata-rata 25° - 30°C.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan aspek kognitif terbesar pada perempuan mengetahui Herman Hn adalah sosok pemimpin yang religius sebesar 99,67% dan di bagian paling kecil pada pernyataan perempuan mengetahui tidak semua calon kepala daerah berasal dari birokrasi sebesar 79,7%.

Pada aspek afektif paling besar dibagian pernyataan Perempuan senang untuk mengetahui latar belakang calon Kepala Daerah Kota Bandar Lampung sebesar 99,8 % dan aspek afektif paling kecil di bagian pernyataan perempuan senang mengikuti pilihan politik ibu/kakak dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung sebesar 85%.

Pada aspek evaluatif paling besar pada pernyataan perempuan setuju dengan pola pikir dan cara pandang organisasinya dalam menilai seorang pemimpin sebesar 99,3% dan aspek evaluatif paling kecil pada pernyataan perempuan setuju bila pilihan politik keluarga lebih baik daripada mengikuti pilihan politik sendiri sebesar 91,7%. Dari ketiga aspek tersebut jika dibandingkan maka aspek afektif yang paling tinggi yaitu sebesar 99,8%.

B. Saran

Saran dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung pada masa mendatang hendaknya melaksanakan semua rangkaian proses pemilihan secara profesional dan transparan, sehingga masyarakat luas pada umumnya memiliki penilaian dan orientasi politik yang baik terhadap Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud demokratisasi lokal.
2. Calon Kepala Daerah dan wakilnya yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di masa mendatang hendaknya lebih banyak melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas, dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat memberikan informasi dan pemahaman politik pada saat pelaksanaan kampanye. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat semakin cerdas dalam politik dan tidak dijadikan sebagai objek politik demi memperoleh suara yang besar pada saat pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Perspektif Ekonomi Politik. Integritas Dinamika Press. Jakarta
- Abdullah, Irwan. 2003. *Sangkan Peran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Adman Nursal. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Almond, Gabriel.A. 1990. *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Amiruddin, M. 2003. *Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Cice Verawati. 2009. *Perilaku Pemilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara*. Sulawesi Utara.
- El Sadaawi, Nawal. 2001. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2006. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Gaffar, Affan. 1999. *Perkembangan Budaya Politik Melalui Pemilu*. CIDES. Jakarta.
- Lips, Hilary M., 1993, *Sex & Gender an Introduction*, California, London, Toronto: Mayfield Publising Company.

- Mar'at, 1992. *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya*, Jakarta: Gramedia Media Sarana
- Mediastutie, Mega. 2006. *Orientasi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung*. Skripsi. FISIP Unila.
- Nawalel Saadawi. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, terj. oleh Zulhimiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nursal, Adnan. 2004. *Political Marketing (Strategi Memenangkan Pemilu)*. Gramedia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22
- Rahmawati, Ani. (2004). *Persepsi Remaja Tentang Konsep Maskulin dan Feminim Dilihat dari Beberapa Latar Belakangnya*. Skripsi pada Jurusan PPB UPI Bandung: tidak diterbitkan.
- Santrock, W. J. (2003). *Adolecent, Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press. Semarang.
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi. 2002. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Siregar, Syofian. (2010). *Statistik deskriptif untuk penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sjamsuddin, Nazarudin. 1993. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia

Tan, Mery.G. 1992. *Wanita dan Partisipasi Politiknya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 Bab IV Pasal 18 ayat 4

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

Wind, Meilan. 2006. *Orientasi Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum Pilkada Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung